

---

---

**PENGARUH PRINSIP – PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DAN FILOSOFI TRI HITA KARANA TERHADAP KINERJA  
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KOTA DENPASAR**

**I Gusti Ayu Putu Ariani<sup>1</sup>**

**I Dewa Made Endiana<sup>2</sup>**

**I Putu Edy Arizona<sup>3</sup>**

**I Gede Eka Arya Kusuma<sup>4</sup>**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati, Bali, Indonesia*

email : endixdr@yahoo.com

***Abstract***

*Good corporate governance is a procedure for good company management. The principles of good corporate governance must be applied in organizing to reduce agency conflict, besides that the Tri Hita Karana philosophy which has become Balinese culture it self is expected to be able to improve the performance of an institution. The purpose of this study is to reexamine the effect of the principles of good corporate governance and the philosophy of Tri Hita Karana on the performance of Lembaga Perkreditan Desa in Denpasar City. The sample in this study amounted to 35 LPD in Denpasar City. Determination of the sample used is the saturation sample technique. The analytical method used is multiple linear regression analysis that is equipped with descriptive statistics, the classic assumption test and the model feasibility test. The results showed that the Fairness / Fairness variable had a positive influence on the performance of LPDs in Denpasar City, while the variables of transparency, responsibility, accountability, Independence and Tri Hita Karana Philosophy did not affect the performance of LPDs in Denpasar City.*

***Keywords: Transparency, Responsibility, Independence, Accountability, Fairness, Tri Hita Karana Philosophy, LPD Performance***

**PENDAHULUAN**

Menurut PERDA No 03 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 3 Penggunaan Nama dan Operasional menyebutkan LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan desa dan untuk Krama Desa, artinya LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa yang berada di wilayah desa dan diperuntukan untuk masyarakat desa. LPD dimiliki oleh krama desa di wilayah tertentu dan terikat oleh adat dan budaya desa tersebut dan telah memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, sehingga

perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya. LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit, utamanya dari dan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa adat tempat LPD didirikan. Pada dasarnya praktek kerja LPD tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain, baik formal maupun informal. Kaidah-kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan disesuaikan dengan lingkungan tempat didirikannya LPD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut : (1) memberikan pelayanan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan hingga keberbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat, sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa .LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi LPD untuk membangun desa pekraman.

Seperti yang dimuat pada Harian Bali Post tanggal 30 September 2013 bahwa LPD juga harus menyiapkan SDM-nya agar berkualitas dengan memberlakukan prinsip *good corporate governance*. Bahkan, bila perlu pengurus LPD wajib mengikuti *fit and proper test*. Hal lain juga diungkapkan oleh Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang dikutip dari beritabali.com dalam pembukaan kegiatan meningkatkan eksistensi LPD di Graha Sewaka Dharma tanggal 18 Mei 2016. Beliau mengaku lima tahun terakhir kinerja LPD di Kota Denpasar terjadi kasus masalah internal. Dengan diterbitkannya dua kasus di tahun 2013 dan 2016 ini dapat disimpulkan bahwa kinerja LPD masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja LPD maka perlu dilakukan beberapa pembenahan dari segi kinerja melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, Menurut (Hassan dan Ahmed, 2012) Dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mengurangi biaya agensi yang timbul sebagai akibat dari konflik kepentingan antara manajer dan

pemegang saham. Keberadaan GCG digunakan sebagai cara yang bermanfaat untuk berfikir tentang beberapa pertanyaan di bidang keuangan. Penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan kinerja LPD sangat penting, karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD (Krismaya, 2014). Aspek kinerja LPD tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksana suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala. Yang menjadi indikator kinerja yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Prinsip-prinsip GCG terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan aturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (Dominikus, 2014). Selain pentingnya penerapan prinsip GCG dalam kinerja LPD, maka diperlukan pedoman yang berkonsep kearifan lokal.

Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Tri Hita Karana berasal dari kata “Tri” yang berarti tiga, “Hita” yang berarti kebahagiaan dan “Karana” yang berarti penyebab. Dengan Demikian Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakraman (desa adat) dengan

berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman (peraturan tertulis desa adat). Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal seperti di Bali, kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bertentangan dengan awig-awig yang ada di Bali. *Local wisdom* dapat dijadikan sebagai pemicu peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, agar setiap kearifan lokal yang ada di setiap provinsi dapat dipayungi oleh undang-undang, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik perlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai-nilai masyarakat sehingga dengan ada dukungan dari lapisan bawah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep *good governance* (Novitasari,dkk, 2020). Dengan menerapkan ajaran Tri Hita Karana diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme dapat mendukung penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan di Lembaga Pengkreditan Desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, filosofi Tri Hita Karana terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meekling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling

efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun pada prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Utari,2016).

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah bahwa pengelolaan LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa LPD tidak mencuri ataupun menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, serta berkaitan dengan bagaimana para krama desa dan nasabah mengontrol para pengelola LPD.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban organisasi bisnis terhadap pihak berkepentingan. Mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber merupakan salah satu hak *stakeholder*. Ini berarti transparan terhadap seluruh informasi harus di tetapkan di LPD guna memberikan kepercayaan bagi *stakeholder*. Keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi inilah yang diharapkan dapat menjadikan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) lebih baik.

*Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi materiil dan relevan

mengenai perusahaan/organisasi. Transparansi diduga salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) . Penelitian yang dilakukan (Endiana, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD se-Kota Denpasar.**

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Salah satu syarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan stakeholder akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. (Dewi dan Dwijayanti, 2014) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesisi sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD se-Kota Denpasar.**

### **Pengaruh Responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

*Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan / organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan, terlebih dahulu perusahaan harus menaati peraturan perundang-undangan. Sikap dari perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga usaha dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan (Setyawan, 2013) menghasilkan terdapat pengaruh positif antara responsibilitas dengan kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikecamatan

Mengwi Kabupaten Badung. (Pradnyasari, 2016) juga menyatakan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H<sub>3</sub>: Tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja LPD se-Kota Denpasar.**

#### **Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (Suci,2013). Keputusan yang diambil manajemen harus secara independen yang dalam hal ini berarti kemampuan manajemen tidak terikat oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Objektivitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja LPD karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan. Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>: Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD se-Kota Denpasar.**

#### **Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

*Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (Bukhori, 2012) menyatakan bahwa perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan atas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar, kewajaran dapat diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran

dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Menurut penelitian (Sari, 2017) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Utara. Menurut uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>5</sub> : Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD se-Kota Denpasar.**

### **Pengaruh Folosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Tri Hita Karana berasal dari kata “Tri” yang artinya tiga, “Hita” yang artinya kebahagiaan, dan “Karana” yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Pada dasarnya hakekat ajaran Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan kehidupan dengan manusia di Dunia ini. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekitarnya. Ketiga itu meliputi hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan Tuhan.

Tri Hita Karana menyatakan bahwa masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan. Dengan demikian, keseimbangan dengan lingkungan merupakan nilai budaya masyarakat Hindu yang sangat cocok diadopsi sebagai budaya organisasi. Nilai keseimbangan masyarakat Hindu secara menyeluruh didasarkan atas ajaran filsafat Tri Hita Karana.

Nilai filosofi yang terdapat pada Tri Hita Karana dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk sikap mental dan perilaku sumber daya manusia yang dapat mengantarkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menuju pertumbuhan yang meningkat dan kinerja keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa karena dalam filosofi Tri Hita Karana tersirat nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, kreativitas, kerja keras tanpa mengenal putus asa, menghargai waktu dan kerja sama yang humoris yang dapat menghantarkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menuju



kepada pertumbuhan dan kinerja yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2012) menghasilkan bahwa Filosofi Tri Hita Karana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H<sub>6</sub>: Penerapan filosofi Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja LPD se-Kota Denpasar.**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kota Denpasar, yaitu sebanyak tiga puluh lima LPD. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, filosofi Tri Hita Karana. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Transparansi adalah sikap keterbukaan pengurus LPD dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga. Aspek ini akan diukur dengan skor dari (3) tiga pertanyaan mengenai jumlah badan pengawas yang dimiliki LPD, kemampuan pengurus LPD dalam menyediakan laporan keuangan dan pertemuan antara pengurus.

Akuntabilitas adalah pengelola LPD harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Aspek ini akan diukur dengan skor dari (3) tiga pertanyaan mengenai pemahaman ketua dan pengelolaan LPD terhadap visi, misi dan tujuan LPD, peran dan tanggung jawab ketua dan pengelola LPD serta pendokumentasian laporan keuangan beserta bukti transaksi yang baik.

Responsibilitas adalah pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang undangan dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat. Aspek ini akan diukur dengan skor dari (3) tiga pertanyaan mengenai ketaatan ketua dan

pengelola LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan dan pengambilan keputusan.

Independensi dalam pengambilan keputusan pengelola LPD harus bebas dari intimidasi dari pihak lain sehingga terhindar dari kerugian. Aspek ini akan diukur dengan skor dari (2) dua pertanyaan mengenai keputusan ketua yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD dan ketua LPD menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun.

Kewajaran adalah perlakuan yang adil dan setara untuk semua kalangan (krama desa, pemerintah, dan pengelola) sesuai dengan perjanjian dan perundang undangan yang berlaku. Aspek ini akan diukur dengan skor dari (3) tiga pertanyaan mengenai kesempatan krama desa/anggota LPD berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi krama desa.

Tri Hita Karana memiliki pengaruh yang sangat penting dalam tata kelola LPD yang dapat melahirkan nilai-nilai, meliputi prinsip Parahyangan, Pawongan dan Palemahan. Aspek ini diukur dengan skor dari (4) empat pertanyaan mengenai kesesuaian letak tempat suci, pola kerja yang fleksibel terhadap kegiatan agama, kegiatan sosial, dan hubungan antar staff.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dengan teknik kuisisioner. Teknik kuisisioner dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini (baik pada variabel independen dan dependen) akan diukur dengan menggunakan skala *likert* yang dituangkan dalam bentuk kuisisioner. Pada skala likert kemungkinan jawaban tidak hanya sekedar setuju atau tidak setuju ataupun jawaban lainnya yang mempunyai dua alternatif jawaban melainkan dibuat dengan lebih banyak jawaban, memiliki skala 5 titik antarlain : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan disini adalah teknik Sampling Jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 35 LPD yang beroperasi di Kota Denpasar. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja dengan menggunakan program SPSS. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan Pengujian Instrumen, Uji Asumsi Klasik dan Uji Kelayakan Model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dalam penulisan ini, menggunakan metode Person Moment, jika nilai koefisien hitung  $> 0,3$  maka item tersebut valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistic Package of Social Science). Hasil uji validitas dari 35 responden pada LPD di Kota Denpasar menyatakan bahwa instrumen yang digunakan valid karena memiliki koefisien hitung diatas 0,3.

Hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness / Kewajaran, Filosofi Tri Hita Karana dan Kinerja LPD memiliki koefisien cronbach's alpha lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa pertanyaan pada kuesioner tersebut reliabel. Hal ini berarti, apabila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala yang sama, maka pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten.

Sebelum melakukan analisis linear berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari : (1) Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai sebesar 0.108 dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar

0,200 > 0.05. Dari hasil nilai Kolmogorov-Smirnov dan nilai Asymp Sig (2-tailed) dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang berdistribusi normal.

(2) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan dengan pengamatan lain (Ghozali, 2016:139). Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji Glejzer. dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan nilai abres (absolute residual) pada uji gleser untuk independen variabel maka diperoleh nilai signifikan seluruh variabel bebas lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data variabel yang digunakan dalam penelitian.

(3) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016:103). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Pada uji multikolinieritas ini semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Hasil pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,568 atau 56,8% ini artinya variabel kinerja Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan variabel dependen mampu dijelaskan sebesar 56,8% oleh variabel independen yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness/Kewajaran, dan Filosofi Tri Hita Karana, sedangkan sisanya sebesar 43,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan regresi.

Diketahui nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 8.005 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness/ Kewajaran dan Filosofi Tri Hita

Karena secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sehingga model penelitian Fit dengan data amatan.

**Tabel 1**  
**Hasil Multiple Regression Analysis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.821	4.656		.391	.699		
	TR	.478	.485	.212	.986	.333	.293	3.416
	AK	.498	.363	.247	1.371	.182	.415	2.412
	RES	-.068	.432	-.028	-.157	.876	.430	2.328
	IND	.308	.278	.153	1.108	.278	.708	1.412
	FR	.954	.340	.424	2.802	.009	.591	1.691
	THK	.070	.279	.041	.253	.802	.518	1.930

a. Dependent Variable: KLPD

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 1 dapat dilihat bahwa Nilai koefisien regresi untuk variabel transparansi (TR) sebesar 0,478 dengan signifikansi sebesar 0,333 lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Nilai koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas (AK) sebesar 0,498 dengan signifikansi sebesar 0,182 lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Nilai koefisien regresi untuk variabel tanggung jawab (RES) sebesar 0,068 dengan signifikansi sebesar 0,876 lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Nilai koefisien regresi untuk variabel independensi (IND) sebesar 0,308 dengan signifikansi sebesar 0,278 lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Nilai koefisien regresi untuk variabel kewajaran (FR) sebesar 0,954. Menjelaskan bahwa jika kewajaran mengalami penurunan 1 satuan maka kinerja LPD akan mengalami penurunan sebesar 0,954. Sebaliknya, apabila variabel kewajaran mengalami peningkatan maka kinerja LPD akan mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi untuk variabel Filosofi Tri Hita Karana (THK) sebesar

0,707 dengan signifikansi sebesar 0,802 lebih besar dari 0,05 , ini berarti bahwa Filosofi Tri Hita Karana tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena krama desa sebagai anggota LPD masih jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika suatu LPD dapat menangani masalah intern lembaganya dengan profesional dan dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat menciptakan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan persamaan persepsi antar karyawan maka kinerja lembaga akan meningkat.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat LPD yang belum mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik serta laporan keuangan dan bukti transaksi belum terdokumentasikan dengan baik. Terdapat aspek lain dalam meningkatkan kinerja LPD disini selain dari aspek akuntabilitas yakni melalui penyaluran kredit kepada warga desa, dimana laba yang di dapat nanti akan menjadi keuntungan LPD dan anggota LPD itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam PERDA No.03 tahun 2017 dimana LPD adalah lembaga milik desa yang bertujuan untuk memajukan desa adat setempat.

### **Pengaruh Responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga perkreditan Desa se Kota Denpasar. LPD yang didirikan dengan tujuan membangun desa adat seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya terhadap krama desa, selain itu LPD juga harus berkontribusi dalam kelestarian lingkungan

seperti pembenahan Pura dan Balai Banjar. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka LPD harus mampu meningkatkan pendapatannya, salah satunya dengan cara mengelola beban usahanya seefektif mungkin. BOPO merupakan hal saling berkaitan dimana jika pendapatan operasional lebih besar dari pada biaya operasionalnya maka LPD akan mendapat keuntungan lebih besar, sehingga LPD dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan Desa Adat.

### **Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa LPD dalam pengelolaan lembaganya masih terpengaruh pihak lain / krama desa selaku pemegang saham. LPD diwajibkan melibatkan krama desa dalam pengambilan keputusan dengan mengadakan pararem dengan prajuru desa sebagai perwakilan krama desa. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan diri serta evaluasi kerja bagi para pegawai LPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta sistem pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan terbebas dari pengaruh pihak yang merugikan.

### **Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fairness/kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja LPD kearah yang lebih baik.

### **Pengaruh Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Filosofi Tri Hita Karana tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se Kota Denpasar. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang berpedoman pada aturan aturan desa adat yang sangat kental dengan kearifan lokal. Dalam penyaluran kredit tentu saja akan terjadi masalah principal -

agent dimana debitur sebagai agent dan pihak LPD sebagai principal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Untuk mencegah hal tersebut maka LPD perlu memberikan sanksi adat kepada debitur yang tidak berusaha dan tidak memiliki etikad baik dalam melunasi kreditnya. Kinerja LPD akan meningkat jika masalah principal – agent dapat diselesaikan atau di minimalisir.

## SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh *good corporate governance* dan filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja LPD se Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Filosofi Tri Hita Karana tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se Kota Denpasar. Meningkat ataupun menurunnya tingkat variabel tersebut tidak berhubungan dengan peningkatan kinerja LPD di Kota Denpasar. Sedangkan untuk variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se Kota Denpasar. Hal ini dikarena LPD harus senantiasa memperhatikan hak hak para pemegang saham dengan asas kewajaran agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Dengan mempertimbangkan pengaruh Good Corporate Governance dan Filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan dalam berorganisasi diharapkan kedepannya lebih mampu meningkatkan kinerja lembaga pengkreditan desa (LPD). Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus LPD perlu dilakukan agar pengurus lebih memahami tugas tugas serta tanggungjawabnya pada LPD.

Penelitian ini menggunakan 35 LPD dengan melibatkan para pemucuk / Ketua LPD di Kota Denpasar sebagai responden. Di harapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas



objek penelitian dan ruang lingkup penelitian faktor atau proksi lain untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asrini, Ni Wayan. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati
- Bukhori, Iqbal. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI 2010). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Budiman, Arif. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Bulandari, I Gusti Agung Wita. 2015. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Skripsi. Universitas Udayana.
- Dewi, Kadek Krismaya. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana* 7(3), h: 559-573
- Dewi, I. G. A. S., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2020). Pengaruh Leverage, Investment Opportunity Set (Ios), Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 125-136.
- Endiana, I. D. M. (2019). Implementasi Corporate Governance Pada Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(1), 92-100.
- Ghozali, H. Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi Keenam. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, ketut. 2011. Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Journal Analisis Manajemen*, 5(2), h:23-36.
- Jensen, M.C., and W.H Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal Of Financial and Economic*, 3, 205-360
- Kaler. 2008. Keseimbangan antar unsur Tri Hota Karana, IKIP Negeri Singaraja
- Krismaya Dewi, Kadek. 2014, Pengaruh penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kineja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kbupaten Gianyar Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), h: 559-573.

- Meitradi Setyawan, Komang dan Asri Dwija Putri, I. G. A. M. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), h: 586-598.
- Ningsih, AA Putu Ratih Cahaya dan S, P. Dyan Yaniartha, 2013, Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.1 : 92-109
- Novitasari, I., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 47-57.
- Pradnyaswari, Luh gede Diah Ary. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.  
Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Sari, Dek Ayu Meia Kartika. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Badung Utara. Skripsi. Universitas Mahasaraswati
- Setyawan, Komang Meitradi. 2013. Pengaruh Good Corporate Governamce Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suardiana, I Nengah. 2016. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014. Skripsi. Universitas Mahasaraswati.
- Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013 . Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shil, N. C. 2008. Accounting for Good Corporate Governance. *JOAAG* 3(1), pp: 22-31
- Suryantara, I Wayan. 2018. Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Keuangan LPD se-Kota Denpasar. Skripsi. Universitas Mahasaraswati.
- Yuniantika, Nanda Claudia. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). Skripsi. Universitas Diponegoro.